

Kajian:  
Pembelajaran PPKn

### Implementasi Pendidikan Politik dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Muhammad David <sup>1</sup>, Prayoga Bestari <sup>2</sup>, Panggih Nur Adi <sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Peneliti Ilmu Pengetahuan Sosial*  
*muhddavid@gmail.com*

<sup>2</sup> *Dosen Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia*  
*yogabestari@upi.edu*

<sup>3</sup> *Dosen PPKN, Universitas Labuhanbatu*

**Abstrak** — The research entitled "The Application of Political Education in Preventing Corruption Crime" is a study that uses a qualitative approach and a case study method. The purpose of this study is to describe how the application of Political Education in preventing criminal acts of corruption; Strategy in preventing corruption that involves party cadres. The reason for carrying out this research is to identify how the strategy of implementing party political education in preventing corruption, especially in DPW PKS Jawa Barat. Determination of research informants was carried out by purposive sampling technique. Data collection research was conducted by interview, observation and documentation techniques. Data analysis techniques in this study used data reduction techniques, data presentation, drawing conclusions and verification. The validity of the data used is source and technique triangulation. The results showed that the application of political education in DPW PKS Jawa Barat in an effort to prevent corruption was based on the development of Islamic political morals carried out in a curricular, routine and continuous manner. The political education is carried out through persuasive, detective and repressive designs.

*Keyword: Political, Education, Corruption*

#### Pendahuluan

Berbicara tentang politik, maka yang utama harus disiapkan ialah pengetahuan tentangnya. Sebagaimana seorang yang ingin membuat sebuah makanan lezat, maka ia harus punya pengetahuan yang banyak dalam hal memasak. Konsep dasar ini membuat cakupan politik menjadi lebih sehat. Terlebih, dalam bagaimana kita sebagai warga negara melihat politik dalam skala tertentu, baik yang berpengaruh terhadap diri kita secara pribadi maupun secara kelompok sebagai sebuah bangsa. Nilai-nilai pengaruh yang ditimbulkan dalam politik ialah alasan

mengapa politik itu sebagai ilmu yang harus dipelajari. Meskipun ada banyak sekali orang menjadikan politik sebagai ranah yang terlarang untuk dimasuki. Prinsip semacam ini membuat politik menjadi sebuah gap merah yang hanya orang-orang tertentu saja boleh mempelajari dan masuk ke dalamnya. Padahal cara berpikir semacam inilah yang mengakibatkan ketidakmatangan pribadi maupun kelompok dalam memandang politik sebagai bagian yang tidak lepas dari kehidupannya.

Masyarakat yang sadar akan pentingnya politik akan senantiasa melakukan

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

pengamatan terhadap proses- proses politik. Pengamatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana politik berdampak terhadap isu-isu yang dekat dengan keberadaannya sebagai warga negara. Kegiatan ini akan bernilai, bila di barengi dengan prinsip-prinsip pengetahuan yang benar, tidak hanya melihat politik dalam perspektif sempit. Namun melihat politik dalam konteks yang luas dan berbagai sudut pandang. Kegiatan- kegiatan tersebut hanya akan dapat tercapai bila seorang atau sekelompok orang memperoleh pendidikan politik dari para agen politik. Dalam hal ini memuat partai politik salah satunya. Sebagaimana partai politik dapat di pandang sebagai kendaraan politik, maka ia berkewajiban untuk menerapkan pendidikan politik yang secara khusus untuk para kader politiknya maupun secara umum untuk masyarakat luas.

Kesadaran akan pentingnya politik menjadi bagian dari dalam diri pribadi manusia ialah akibat dari penerapan pendidikan politik secara umum. Konsep pendidikan dalam ranah ini merupakan konsep pendidikan yang secara tidak langsung mempengaruhi orang untuk memiliki ketertarikan dalam hal mengamati, mempelajari dan menganalisis proses-proses politik yang terjadi disekitarnya. Adapun secara kurikuler, pendidikan politik ialah proses pendidikan yang telah disusun secara sistematis dan terstruktur. Ia meliputi berbagai cara tentang bagaimana seharusnya politik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dan dijalankan dari berbagai posisi. Proses pendidikan semacam ini dinamakan sebagai pendidikan yang sengaja atau secara istilah dinamakan pendidikan formal. Konsep ini lahir dan tumbuh hanya pada lembaga-lembaga politik yang berwenang dalam penerapannya, jadi tidak dapat kita jumpai

secara utuh pada lembaga- lembaga non-politik. Salah satu lembaga yang punya wewenang dalam menerapkan pendidikan politik ialah partai politik.

Kedudukan partai politik menjadi sangat strategis di negara demokrasi. Ia punya berbagai kedudukan dan fungsi, salah satu yang menjadi fokus dalam tulisan ini ialah fungsi partai politik dalam urusan pendidikan politik. Sebagai lembaga politik, partai politik setidaknya menjangkau yang dimaknai sebagai mesin politik yang ia bukan hanya saja mampu mempengaruhi para anggota partai untuk mewujudkan cita-citanya, melainkan juga sebagai sarana pemasaran politik secara luas kepada masyarakat.

Akibat dari peran strategis diatas, menyebabkan partai politik menjadi akomodasi yang cocok diamati dalam proyeksinya sebagai mesin politik di negara demokrasi. Tingkat kebermanfaatannya yang besar dalam mendukung pelaksanaan demokrasi yang berasaskan pada ide-ide politik nyatanya telah berdampak pada aspek positif maupun negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disatu sisi, partai politik yang dibangun atas dasar idealisme yang tertuang dalam pendidikan politik yang baik, akan menggaet dan merangkul pemikiran individu dan kelompok menuju sebuah proses politik yang sehat. Dan sebaliknya, minimnya penerapan pendidikan politik hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru, salah satunya korupsi.

Memandang korupsi sebagai masalah, hakikatnya bukan hanya karena minimnya pendidikan politik. Namun kompleksitas pendidikan politik akan sangat berdampak pada bagaimana seorang kader bersikap dan berperilaku. Dari sisi ekonomi dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan nilai efisiensi ekonomi dalam skala besar, selain itu korupsi

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

juga telah berdampak pada ketimpangan ekonomi dan pendapatan masyarakat (Gupta dan Alonso, 2002). Dari sisi sosial, bahwa telah terjadi kesenjangan hidup masyarakat, yang mengakibatkan adanya gap secara sosial masyarakat (Marchal & Wathen, 2012). Ketiga dampak tersebut ialah gambaran umum yang dapat kita abstraksikan ketika perilaku korupsi telah menjadi sebuah fenomena dalam masyarakat. Maka, salah satu solusi dalam pencegahan berbagai persoalan yang dihadapi oleh partai politik ialah pembenahan melalui pendidikan politik.

Partai politik dewasa ini dituntut untuk melakukan reformasi dalam pengorganisasiannya. Termasuk juga tuntutan akan kematangannya dalam melihat persoalan politik, baik yang terjadi secara internal maupun eksternal. Benny (2011, Hlm. 77) yang mengungkapkan bahwa, "Partai politik yang memiliki kematangan secara konsep dan ideologi akan cenderung mempengaruhi kematangan politik para elitnya". Kasus korupsi dapat dikatakan sebagai bukti ketidakmatangan partai dalam urusan organisasi. Hal ini menjadi anggapan, karena partai tidak berperan penuh dalam mengelola para kadernya untuk dapat bersikap ideal, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Transparansi pengelolaan partai yang lemah. Strategi partai yang tidak mumpuni dalam penyelesaian masalah. Tidak ada target dalam pemulihan kondisi politik baik di internal maupun eksternal partai. Partai membantu politisi mengatasinya masalah koordinasi dengan menciptakan horizon waktu, karena politisi tertarik pada diri sendiri dan memiliki sangat sedikit motivasi untuk merencanakan inovasi (Natasha, 2011, Hlm. 5).

Penelitian ini nantinya dapat menjadi sebuah gambaran dalam melihat peran sekaligus fungsi partai politik, khususnya di DPW PKS Jawa Barat, sebagai kendaraan

politik yang diharapkan dapat menghasilkan kader politik yang mempunyai integritas, terutama terhindar dari perkara korupsi. Hal ini merujuk pada kajian tentang konsep partai politik yang bukan hanya sebagai kendaraan politik namun juga sebagai penyelenggara pendidikan politik bagi seluruh warga negara. Strategi-strategi yang dipilih partai politik dalam proses kaderisasi para elit politik berupa rekrutmen, penetapan calon elit politik, sampai pada pemetaan strategi dan metode yang diterapkan melalui pendidikan politik menjadi sebuah kajian penting dalam penelitian ini. Hal ini menjadi barometer kualitas partai politik. Terakhir, bahwa kajian ini juga akan merumuskan sebuah persepsi akan bagaimana DPW PKS Jawa Barat melihat pentingnya pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dalam pendidikan politik. Termasuk juga soal intervensi partai terhadap kader, khususnya dalam upaya mencegah terjadi berbagai pelanggaran hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah dan realitas yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam berkenaan dengan kajian pendidikan politik tentang startegi partai politik dalam hal mencegah tindak pidana korupsi melalui penelitian yang berjudul "Penerapan Pendidikan Politik Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di DPW PKS Jawa Barat)".

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, adapun subjek kasus dalam penelitian ini difokuskan pada DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat. Penentuan subjek penelitian kasus di DPW PKS Jawa Barat didasarkan pada pertimbangan berikut: PKS merupakan partai kader yang sejak lama berpartisipasi dalam kancah politik nasional;

Kajian:  
Pembelajaran PPKn

Partai pemenang pada Pemilihan kepala daerah Jawa Barat di dua periode; Minim akan catatan buruk dalam kasus korupsi; Akses terhadap sistem kepartaian yang terbuka; Partai yang memiliki program pendidikan politik berkala, berbentuk *tarbiyah* (pendidikan); DPW PKS Jawa Barat merupakan DPW PKS dengan jumlah masa terbesar di Indonesia. Dari beberapa alasan tersebut, maka peneliti menganggap bahwa DPW PKS Jawa Barat merupakan pilihan yang menarik dalam meneliti tentang bagaimana partai dapat berperan dalam ruang lingkup tertentu, berkenaan dengan kajian pendidikan politik yang ditinjau dari aspek penerapan, pendekatan, teknik, nilai dan tujuan DPW PKS dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada kadernya di wilayah Jawa Barat.

### Hasil dan Pembahasan

DPW PKS Jawa Barat sebagai Dewan pengurus Partai di tingkat provinsi yang padanya dibebankan agregasi politik yang mantap untuk sebuah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Hal ini lantas juga beriringan dengan capaian PKS yang sampai tahun 2018 mengklaim telah memiliki anggota dan simpatisan baik yang aktif maupun tidak sebanyak lebih dari orang di wilayah Jawa Barat. Sebuah pencapaian yang dinilai banyak, namun juga dapat dianggap kurang bila harus melihatnya dari sudut pandang target yang seharusnya. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia, DPTnya berjumlah lebih dari 32 Juta jiwa. Artinya bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang punya potensi cukup besar, dari pandangan untuk melihat daerah ini sebagai basis politik. Namun nyatanya PKS sendiri mengakui bahwa masih belum maksimal dalam mewujudkan

target kerjanya untuk menggaet kader dan simpatisan dengan jumlah yang lebih besar.

Partai politik yang baik bukan hanya dinilai dari bagaimana ia mampu menciptakan iklim politik yang ideal, namun juga harus mempertimbangkan bagaimana idealismenya dapat menjadi modal baginya untuk bisa memperoleh pengaruh pada apa yang telah ia targetkan sebagai bentuk kegiatan politiknya. Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Dawes dkk (2010) mengungkapkan bahwa “...*political participation have begun to incorporate actors who possess social preferences. However, these models have failed to take into account the potentially incongruent political goals*”. Maknanya ialah seringkali para aktor politik yang memiliki preferensi sosial yang baik, dianggap gagal dalam menyelaraskan dengan tujuan politiknya. Maka dari itu yang penting ialah bagaimana bentuk dukungan dan kerelaan masyarakat untuk sama-sama mendukung partai politik dalam pemilihan melalui aktor-aktor politik yang dilahirkan.

Keberpihakan aktor politik terhadap ide politik partai ialah keinginan semua partai politik. Bagaimana mungkin partai politik yang awalnya dibentuk untuk menularkan ide dan gagasan melalui perebutan kekuasaan, lantas tidak memiliki kekuasaan dalam hal kekuatan politik. Maka ia akan merasa kesulitan untuk mewujudkan semua hal tersebut, khususnya di negara demokrasi langsung seperti Indonesia. Ukuran jumlah pemilih menjadi tolak ukur yang sepenuhnya menentukan keberhasilan dan kegagalan sebuah partai politik dalam sebuah kontestasi politik, baik di tingkat daerah hingga nasional.

Berdasarkan jumlah pemilih dan besarnya potensi Jawa Barat sebagai provinsi yang dapat dijadikan basis perjuangan partai,

Kajian:  
Pembelajaran PPKn

membuat partai-partai politik harus bekerja keras dan juga cerdas. Sudah barang tentu ia harus melihat wilayah ini secara utuh, baik dari segi ekonomi, sosial, keamanan, dan kebudayaan. Empat segi tersebut harus dilihat sebagai tantangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan atas keempatnya. Upaya untuk melakukan penyelesaian terhadap isu-isu yang langsung dirasakan oleh masyarakat membuat partai politik dapat menjadi meningkat secara elektabilitas dan juga secara dukungan. Hal ini dapat kita tinjau dari seberapa jauh jangkauan sebuah partai tersebut dalam mengukur angka dukungan yang jatuh padanya dari para pemilih, sehingga ia mampu meraih dan mempertahankan kekuasaan dengan mudah.

Salah satu indikator yang membuat mengapa partai politik dianggap punya pengelolaan organisasional baik atau buruk ialah melalui pendidikan politiknya. Keberadaan pendidikan politik yang baik akan menyelaraskan banyaknya tantangan dan tuntutan masyarakat yang menginginkan perubahan pada tahapan serius untuk menyelesaikannya. Hal ini yang membuat pendidikan politik menjadi penting, bukan karena unsur seremoninya sebagai sebuah kegiatan yang dinilai berat dan eksklusif untuk membicarakan politik secara luas. Melainkan pendidikan politiklah yang mampu menggiring kader dan simpatisan untuk berpikir dan berperilaku yang sepatutnya dilakukan demi meningkatkan kemampuan partai untuk meraih kekuasaan.

Secara pragmatis, pendidikan politik hanya digunakan sebagai pintu masuk untuk menggeber semangat para kader. Namun secara idealis, bahwa pendidikan politik sebagai sebuah tanggung jawab yang bukan hanya akan membuat sebuah partai dinilai baik atau buruk, namun juga pada pola pembentukan sikap warga negara dalam

proses politik. Kartono (2009, Hlm. 63) menggambarkan bahwa “Pendidikan politik sebagai bentuk penekanan atas relasi individu dengan individu lain atau dengan masyarakat di tengah kehidupan sosial”. Aktivitas semacam tadi membuat pendidikan politik menjadi luas secara makna, dimana ia bukan hanya menyentuh soal pengetahuan saja, melainkan juga pada proses interaksi yang moderat.

Disamping itu, tidak dapat dihindari bahwa pendidikan politik juga sebagai modal bagi para kader politik maupun masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja para pejabat publik maupun saat ia menjadi pejabat publik. Esensi pendidikan politik yang digaungkan oleh partai politik tidak sekedar tentang pengetahuan saja, melainkan juga bagaimana pemahaman politik yang terbuka akan mewujudkan apa yang dimaknai oleh Marumen (2016) “...*political parties is its efforts to control the implementation of government power by placing its own members in public offices where government policy is determined*”. Artinya bahwa, partai politik yang baik akan terus melihat bagaimana kekuasaan itu menjadi agenda utamanya, dan ia harus punya modal yang untuk meraih kekuasaan tersebut dengan kekuatan menempatkan para kadernya menjadi bagian dari kekuasaan tersebut. Adapun terkait dengan persiapan yang harus dilakukan oleh partai ialah menyiapkan pendidikan sebaik mungkin untuk itu. Dari sudut pandang penerapan pendidikan politik, maka DPW PKS Jawa Barat ialah salah satu mesinnya. Dikatakan mesin, karena ia punya daya dan energi yang diproduksi untuk menghasilkan *output* yang bernilai politis juga. Nilai politis jangan dianggap hanya sebagai nilai pragmatis, yang seutuhnya hanya berorientasi pada kekuasaan saja, melainkan juga pada penilaian

Kajian:  
Pembelajaran PPKn

bagaimana tujuan pendidikan hakikatnya akan mampu memperbaiki sikap dan intelektualis masyarakat dalam melihat politik khususnya.

Secara kurikuler, maka pendidikan politik di DPW PKS Jawa Barat dapat dikatakan hampir sama dengan DPW PKS lainnya. Menjadi berbeda karena ruang dan cakupannya menjadi lebih luas dan banyak berdasarkan data pemilih dibanding dengan daerah lainnya. Pengurus partai tingkat wilayah ini hakikatnya telah punya rancangan untuk menerapkan pendidikan politik. Penulis menilai, bahwa pola yang diberlakukan menjadi tidak jauh dari apa yang diistilahkan secara nasional oleh PKS yaitu melalui gerakan dakwah. Kegiatan politik dilakukan secara dalam dua aspek, yaitu aspek formal dan non-formal. Aspek formal memuat kegiatan-kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan yang terstruktur rapi dan punya target yang jelas. Sedangkan pendidikan politik dari aspek non-formal lebih kepada kegiatan politik yang insidental, dilakukan tidak secara terstruktur dan terencana, meskipun tetap punya target-target yang jelas.

Sudut pandang dakwah yang ingin diterapkan dalam pendidikan politik PKS ialah melalui kegiatan-kegiatan yang berpondasikan pada nilai-nilai syiar keislaman. Nilai-nilai ini yang nantinya diterapkan dan dianggap sebagai amunisi paling memungkinkan setiap pergerakan PKS Jawa barat sebagai partai islam menjadi lebih bermakna kepada masyarakat. Pemaknaan nilai ini cukup beralasan, mengingat bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dengan nilai mengharap keridhoan Allah akan menjadi lebih berkah secara unsur lahiriyah dan bathiniyah. Bukan hanya itu, bahwa segmentasi dakwah yang dinilai hanya memuat kegiatan antar manusia secara

*muamalah*, nyatanya lebih luas dari yang pemikiran awam gambarkan. Apabila kita menelusuri cakupan dakwah dalam perspektif pendidikan dalam islam, maka jangkauannya menjadi sangat luas dan mendalam. Ia tidak dibatasi pada segmentasi tertentu, karena secara hakikat, dakwah ialah upaya sadar yang dilakukan demi menerapkan dan menyebarkan paham-paham Ketuhanan dalam setiap lini kehidupan manusia.

Dakwah dan politik yang diterapkan dalam proyeksi pendidikan politik di PKS dilakukan secara berkala. Jadwal kegiatan ini dibuat sangat padat dan terencana, dimana setiap kegiatan politik yang dilakukan haruslah direncanakan dengan serius dan matang mendalam. Meskipun dalam praktiknya, pendidikan politik yang dilakukan tidak harus dalam suasana yang serius, namun tetap terukur secara umum. Adapun PKS membaginya dalam beberapa bentuk kegiatan yang secara waktu dilakukan dalam pertemuan mingguan, bulanan, tahunan, dan insidental. Hal ini tentunya merujuk pada *platform* PKS, khususnya dalam memobilisasi anggota atau kadernya dalam kegiatan pemberdayaan.

Setidaknya ada beberapa hal yang harus ditekankan berkenaan dengan penerapan pendidikan politik terhadap warga negara, diantaranya ialah proses dan otonomi individu. Kemudian, model pendidikan politik yang bersifat formal juga harus memberikan ruang kepada warga negara untuk bebas dalam berekspresi dan menyampaikan pendapatnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Khoiron (1999: Hlm. 128-129) yang mengemukakan beberapa metode dalam pendidikan politik, diantaranya: *Pertama*, Bursa gagasan (*brainstorming*), yakni metode dengan memancing pembicaraan atau diskusi dengan sebuah gagasan; *Kedua*, Buzz groups, yakni metode

Kajian:  
Pembelajaran PPKn

yang digunakan dalam kegiatan diskusi secara bersilang antar anggota diskusi politik; *Ketiga*, Studi kusus, yakni kegiatan yang menempatkan partisipasi setiap anggota dengan memunculkan persoalan dan isu yang telah terjadi untuk kemudian dipecahkan secara bersama; *Keempat*, Debat, yakni kondisi diskusi dimana para peserta dipilhkan posisinya untuk mendukung atau menolak sebuah kebijakan yang berdampak pada isu- isu politik.; *Kelima*, Pengharapan, yaitu suatu metode di mana partisipan menyatakan apa yang diharapkan; *Keenam*, Diskusi terbuka, di mana setiap partisipan dapat berbicara tanpa interupsi.

Dalam tubuh pendidikan politik di PKS, istilah pendidikan sering diistilahkan sebagai bentuk pemberdayaan. PKS melakukan kegiatan ini dalam kurun waktu mingguan, hal ini memuat kegiatan yang biasanya dilakukan secara rutin dan terencana. Adapun contoh bentuk kegiatannya ialah *ta'lim* politik, tsaqafah islamiyah, diskusi politik dan pertemuan khusus lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan pada

kurun waktu bulanan ialah pertemuan yang dilakukan rutin dan terencana, mencakup agenda kegiatan yang biasanya lebih besar daripada kegiatan bulanan. Terakhir, pelaksanaan pendidikan politik dalam kurun waktu tahunan merupakan pertemuan politik yang dilakukan secara rutin dalam kegiatan setahun sekali. Kegiatan ini merujuk pada upaya refleksi dan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan selama ini, baik kegiatan yang terencana maupun tidak terencana. Adapun esensi dari kegiatan tahunan selalu jadi bahan untuk menelisik apa yang sebenarnya menjadi peluang dan tantangan untuk bisa diperbaiki dan dipertahankan secara sistem, dilihat dari sudut pandang ketercapaian pada indikator keberhasilan dari

kegiatan itu sendiri.

Kewenangan dalam menerapkan pendidikan politik di DPW PKS Jawa Barat, sepenuhnya ada di Dewan Pimpinan PKS di tingkat wilayah Jawa Barat juga. Dalam hal ini, DPW tidak secara meluas lintas melakukan kegiatannya secara utuh melibatkan semua DPD sampai DPC untuk ikut pada agenda yang dilakukannya. Melainkan, hanya melingkupi kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh para kadernya di tingkat wilayah saja. Adapun untuk pendidikan politik untuk ranah DPD dan DPC ialah dilakukannya secara terpisah, yang jelas merupakan bagian dari sinkronisasi dalam koordinasi antar pimpinan pada setiap tingkatan. Lebih lanjut bahwa Dewan Pimpinan PKS Jawa Barat yang berwenang menerapkan pendidikan politik membagi kader-kadernya dalam kelompok-kelompok kecil, yang disebut dengan Unit Pembinaan dan Pengkaderan anggota (UUPA). Tiap-tiap unit dipimpin oleh seorang pembina yang punya kedudukan secara struktur dan kemampuan lebih tinggi dari anggota yang dibinanya. Pembinaan yang dilakukan secara rutin ialah kegiatan dalam pertemuan dan diskusi saja. Dalam pertemuan tersebut, nilai-nilai dakwah yang berbagai perspektif ditanamkan. Secara umum mengaitkannya dalam urusan politik, karena memang basis pendidikan disini harus ditekankan pada upaya bagaimana setiap persoalan menjadi bagian dari penyelesaian yang bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan politik. Disini, kita dapat memandang bahwa politik harusnya memang termuat dalam semua kegiatan, apalagi isu-isu kehidupan yang sudah barang tentu tidak bisa lepas dari proses politik. Konsep ini, tidak berada pada cakupan bagaimana politik itu dilaksanakan untuk meraih kekuasaan, melainkan politik pada cakupan penyelesaian masalah atau solusi

Kajian:  
Pembelajaran PPKn

terhadap berbagai persoalan yang sedang terjadi.

Prosedur pelaksanaan pendidikan politik di DPW PKS biasanya termuat dalam program kerja DPW, dalam hal ini dapat kita nilai bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga politik ini ialah kegiatan yang telah terencana sebelumnya. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terencana juga menjadi bagian yang tidak bisa lepas, kegiatan ini berupa kegiatan insidental yang dilakukan saat tertentu diluar jangkauan perencanaan yang dibuat. Adapun bentuk perencanaan sendiri telah dirancang diawal kepengurusan di setiap tahunnya. Ada agenda perencanaan yang memuat tahapan kerja, adapula agenda perencanaan yang memuat waktu pelaksanaan. Jelas sekali bahwa apa yang terlihat selama ini dalam tahun-tahun tertentu, sebenarnya merupakan bagian dari bagaimana DPW PKS Jawa Barat ingin melaksanakan sebuah target tertentu yang termuat dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan maupun yang telah dilaksanakan.

Melihat penerapan pendidikan politik yang terencana, maka sudah barang tentu kita harus meninjau bagaimana indikator capaian yang diinginkan dalam setiap kegiatan. Maka dengan ini, PKS melandasinya setiap kegiatan pada berbagai indikator yang tertuang dalam kitab arah kebijakan dakwah dan pemberdayaan SDM yaitu sebagai berikut:

Pertama, setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk penataan kader hakikatnya harus memenuhi kriteri peningkatan kualitas kader yang dalam hal ini termuat dalam upaya pengembangan *kafa'ah* kader. Kedua, setiap kegiatan pendidikan yang dilakukan juga harus sampai pada peningkatan peluang vertikal dalam hal mobilitas kader.

Kedua indikator diatas merujuk pada bagaimana esensi dari pendidikan politik

yang dilakukan memang harus memiliki target dan tujuan. Tidak hanya pada upaya sederhana yang biasa dilakukan untuk memenuhi agenda kegiatan semata. Barangkali ini juga menurut para ahli politik mengatakan sebagai upaya komprehensif dalam merumuskan, merencanakan, dan mengimplementasikan sampai pada tahap evaluasi kegiatan politik yang baik.

Berdasarkan deskripsi tentang penerapan pendidikan politik PKS yang secara umum diatas, pertanyaannya ialah apakah kegiatan pendidikan politiknya menuntun para kader untuk mencegah praktik korupsi?. Maka jawabannya ialah iya, karena secara tinjauan esensi dari semua jenis kegiatan yang dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa partai ini termasuk salah satu partai yang cukup konsen dalam urusan pendidikan politik yang berbasis pada penerapan nilai anti korupsi. Tinjauan diatas merupakan bagian dari analisis penulis terhadap bagaimana seharusnya pendidikan politik, seperti yang diungkapkan oleh Kartono (2009: Hlm. 63) bahwa "Indikator dari pendidikan politik ialah terbentuknya manusia yang partisipatif dan bertanggung jawab". Terbentuknya manusia yang partisipatif dapat dilihat dari bagaimana kader PKS termasuk kader yang punya militansi yang kuat dan solid, yang basisnya ialah nilai-nilai keislaman. Sehingga ada beberapa alasan yang penulis temukan di lapangan, bahwa penerapan pendidikan politik berbasis pada penerapan nilai-nilai keislaman, cenderung akan menghindari yang namanya niatan untuk merumuskan rancangan terhadap perilaku korup. Bahkan secara utuh, politik yang dibangun sendiri memang tidak menginginkan adanya praktik korupsi, terlebih lagi kalau konsep politik ini menjadi lengkap bila mencatut nilai-nilai Agama pada umumnya dan akhlak pada khususnya.

## Kajian: Pembelajaran PPKn

Praktik pendidikan politik yang memuat upaya-upaya dalam pencegahan korupsi juga diperkuat oleh sistem politik internal yang mengedepankan nilai-nilai persaudaraan. Sudut pandang itu penulis amati, dari cara PKS mengelola organisasinya yang nilai-nilai *ukhuwah islamiyah* itu harus menjadi harga mati. Dikaji secara mendalam, bahwa nilai-nilai persaudaraan yang dianut oleh PKS dalam kegiatan pencegahan korupsi cukup beralasan, mengingat bahwa praktik korupsi yang terjadi ialah bagian dari masalah gap personal antar setiap kader politik. Gap ini memunculkan seperti persaingan untuk meraih apa yang cita-citakan secara pribadi, sehingga aroma kompetisi yang kental telah muncul bahkan sebelum kompetisi sebenarnya itu dimulai. Secara sederhana harus dipahami, praktik politik yang kotor sangat memungkinkan terjadi di dalam tubuh partai, seperti contoh upaya mengangkat seorang pejabat publik tanpa melalui mekanisme partai yang jelas, ada praktik curang dalam upaya mengesahkan aturan yang menguntungkan satu pihak saja. Berdasarkan masalah internal partai, konflik yang terjadi antar kader yang seharusnya ada pada nada yang sama menjadi agak rumit untuk disatukan.

Tuntutan akan pendidikannya yang mengharuskan adanya sistem dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, menyebabkan ada beberapa kendala atau penghambat dalam penerapan pendidikan politik di PKS Jawa Barat. Diantaranya termuat dalam beberapa faktor berikut: *Pertama*, finansial. Faktor ini mengharuskan PKS untuk berjuang secara maksimal dalam melihat berbagai peluang dan potensi yang dipilih hanya pada skala prioritasnya saja. Lebih lanjut bahwa faktor ini juga yang membuat akhirnya agenda-agenda politik menjadi sangat mahal untuk dibiayai, alternatifnya dengan berharap

pada sumber modal yang dimiliki partai saja. *Kedua*, media. Faktor ini dianggap sebagai faktor pendukung yang punya dampak besar terhadap pendidikan politik. Bagaimana mungkin pendidikan politik yang sesuai dengan rencana akan terlaksana apabila tanpa didukung media politik yang mumpuni. Dalam hal media politik tersebut memuat pada sarana-sarana yang dibentuk untuk bisa jadi penyambung informasi yang punya nilai kebenaran dan juga rutin secara pelaksanaan. Media politik ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai teras yang luas untuk mencapai sebuah ruangan ingin dimasuki. Perhatian ini dinilai kurang di perhatikan secara mendalam oleh PKS Jawa Barat. *Ketiga*, metode pendidikan politik. Faktor ini penulis nilai sebagai faktor yang harus utuh dilihat sebagai bagian dari evaluasi terhadap pendidikan politik. Sebab, faktor ini menjadi modal untuk menyusun strategi yang tepat untuk bisa menjembatani kemampuan dan peningkatan daya saing PKS Jawa Barat dalam hal yang lebih abstrak. Maksudnya bahwa metode-metode yang dinilai terlalu kaku dalam melihat persoalan-persoalan pendidikan politik dapat menjadi lebih disederhanakan, khususnya dalam membuat sebuah konten pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai syiar keislaman.

### Kesimpulan

1. Penerapan pendidikan politik di DPW PKS dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan
2. Upaya penerapan pendidikan politik dilakukan berdasarkan kedudukan dan level seorang kader partai
3. Pendekatan dalam penerapan pendidikan politik berlandaskan pada nilai-nilai kekeluargaan islam
4. Nilai-nilai pendidikan politik dalam pencegahan korupsi merupakan hasil

Kajian:  
Pembelajaran PPKn

- pengembangan dari nilai-nilai keislaman
5. Pendidikan politik yang diterapkan dalam pencegahan korupsi tidak hanya ditujukan kepada diri kader, melainkan sebagai upaya partai politik untuk mewujudkan iklim politik yang bebas dari tindakan korupsi, baik yang dilakukan dalam upaya pencegahan, pengawasan dan pendampingan

Democracies. *IDCR (Institute For Democracy And Conflict Resolution)*. Hlm. 5

**Daftar Pustaka**

- Dawes, Christopher T, dkk. (2010). Social Preferences and Political ParticipationForthcoming, *Journal of Politics*. Department of Political Science, University of California, San Diego
- Kartini Kartono. (2009), *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju
- Marume, Chikasha, Ndudzo. (2016). Political Parties. *IOSR Journal*. e- ISSN: 2278-1684,p-ISSN: 2320-334X, Volume 13, Issue 4 Ver. VII
- Khoiron M. Nur, dkk. (1999). *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran Konseptual dan Kerangka Kerja)*. Yogyakarta: LKIS.
- Gupta, S., H. Davoodi, & Alonso-Terme, R. (2002). "Does Corruption Affect Inequality and Poverty?". *Economics of Governance* 2002 (3): 23-45.
- Marchal, W.G & S.A.Wathen. (2012). *Statistical Techniques in Business and Economics 15th*. McGraw-Hill.
- Benny K. Harman dan Antonius Sudirman. (2011). Langkah-Langkah Strategis Memberantas Korupsi Di Indonesia. *MMH*, Jilid 40 No. 4 Oktober 2011
- Natasha, M. Ezrow. (2011). The Importance of Parties and Party System Institutionalization in New